



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pemalang, 13 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680323 199003 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN”:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Persentase peningkatan PMA dan PMDN” dengan rumus hitung yaitu “Realisasi investasi tahun n dikurangi realisasi investasi tahun (n-1) dibagi realisasi investasi tahun (n-1) dikali 100%”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yakni Program Pengembangan Iklim penanaman Modal, Program Promosi penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 sebesar 10%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 11,67%. Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 116,7%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 9,73% terjadi peningkatan sebesar 19,8%.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemberian informasi (Profil Potensi Investasi, Lahan dan Peta Kawasan Peruntukan Industri, Infrastruktur Pendukung, Ketenagakerjaan) daya tarik investasi daerah.
2. Lamanya proses pengurusan ijin Amdal di tingkat pusat
3. Belum terimplementasinya pemberian insentif bagi investor.

Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan”:

- Diukur dengan indikator kinerja yang pertama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh” dengan rumus hitung yaitu “Hasil survey Kepuasan Masyarakat”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yakni Program pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 dengan nilai 88,95, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 89,70. Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100,8%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 dengan nilai 88,95 terjadi peningkatan sebesar 0,84%.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten berupa mempersingkat waktu pelayanan terutama untuk permohonan izin yang memerlukan cek lokasi.
2. Meningkatkan informasi/sosialisasi pelayanan perijinan sehingga pemohon izin lebih memahami tentang persyaratan dan prosedsur pelayanan perijinan serta sosialisasi tentang pelayanan perijinan bisa diakses secara online.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga nilai yang sudah baik akan semakin baik.

Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan":

- Diukur dengan indikator kinerja yang kedua yaitu "Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja" dengan rumus hitung yaitu "Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat".
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 dengan nilai 63,50, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 63,84. Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100,5%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 dengan nilai 63,40 terjadi peningkatan sebesar 0,69%.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Setiap dokumen perencanaan anggaran harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan kerja (KAK)
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja.
3. Memberikan informasi perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja melalui crosscutting dan pohon kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	1
1.2.2 Anggaran.....	5
1.3. Dasar Hukum	5
1.4. Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 DPMPTSP Kabupaten Pemalang.....	7
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	8
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	8
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Capaian Kinerja	13
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	13
3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024.....	13
3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya	15
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	16
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	16
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	18
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	18
3.2. Realisasi Anggaran	19
BAB IV	25
PENUTUP.....	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah ASN dan Non ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Berdasarkan jenjang Pendidikan.....	3
Tabel I. 2 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang	4
Tabel I. 3 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2024 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.....	4
Tabel I. 4 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	5
Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	7
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	7
Tabel II. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024.....	8
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2024.....	9
Tabel II. 5 Program DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024.....	9
Tabel II. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024.....	12
Tabel III. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja	13
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
Tabel III. 3 Perbandingan Capaian Kinerja	15
Tabel III. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	16
Tabel III. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	17
Tabel III. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis	18
Tabel III. 7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan	19
Tabel III. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	20
Tabel IV. 1 Capaian Kinerja 2024	25
Tabel IV. 2 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gb.I.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pematang..... 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang nomor 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Penanaman Modal dan

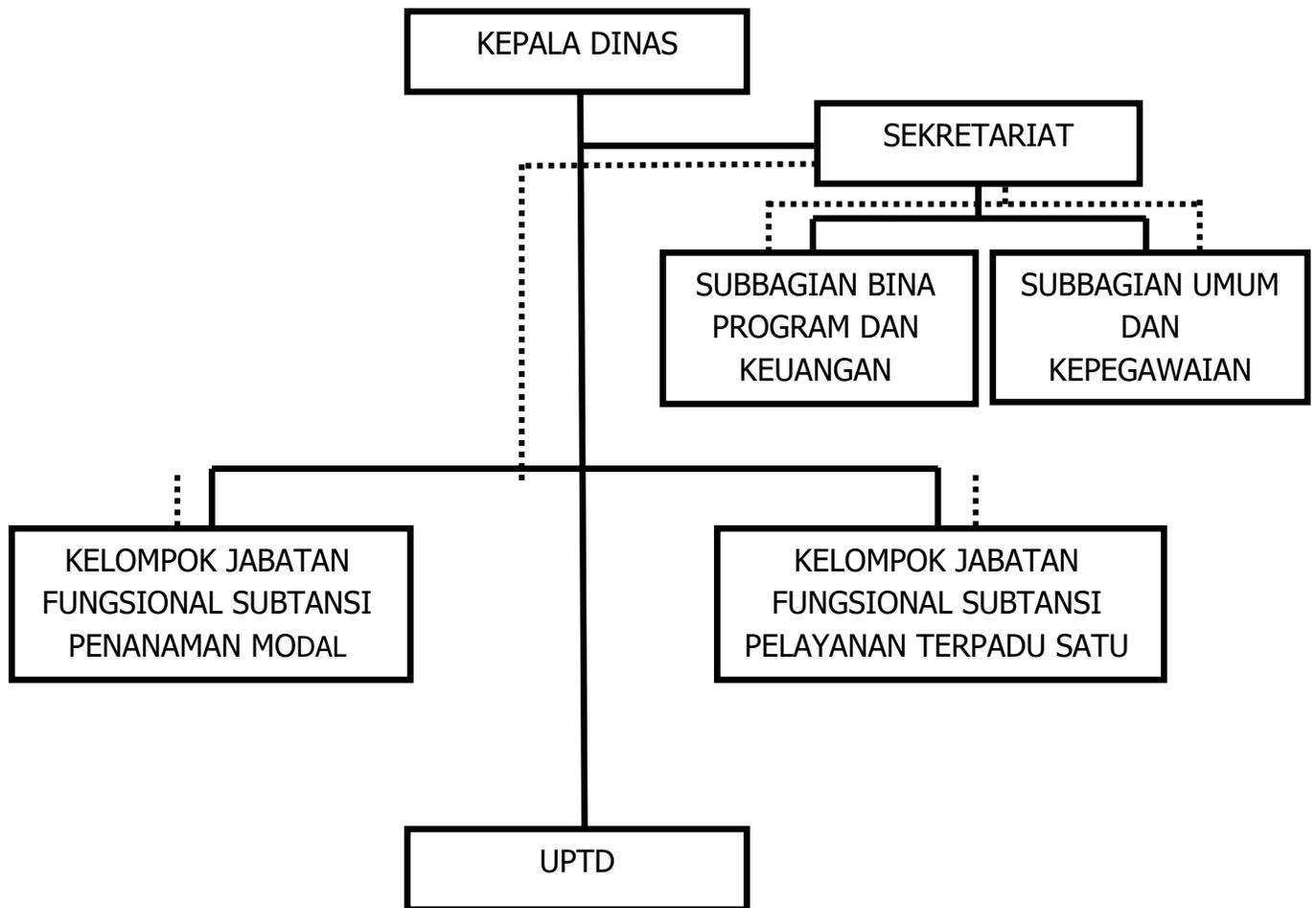
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- a. Sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Sub urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Sub urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. Sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu :
 - 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. Sub urusan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pemalang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pemalang.

Gb.I.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pemalang



Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 1 Jumlah ASN dan Non ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Berdasarkan jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)
Perguruan Tinggi							
1	S2	3	14,28	5,5	1	3,03	1,85
2	S1	9	42,85	16,6	17	51,51	31,48
3	D3	2	9,52	3,7	0	0	0
Bukan Perguruan Tinggi							
4	SMA	7	33,33	12,9	15	45,45	27,77
Jumlah		21	100	38,88	33	100	61,11
Jumlah Seluruh Pegawai		54					

Sumber data : DPMPTSP Kab. Pemalang

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 21 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 3 pegawai (14,28%), golongan III sebanyak 11 pegawai (52,38%) dan golongan II sebanyak 7 pegawai (33,33%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 2 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
1.	Golongan IV		
	IV / c	1	4,76
	IV / b	1	4,76
	IV / a	1	4,76
2.	Golongan III		
	III / d	4	19,04
	III / c	0	0
	III / b	1	4,76
	III / a	6	28,57
3	Golongan II		
	II / d	6	28,57
	II / c	1	4,76
	II / b	0	0
	II / a	0	0
Jumlah		21	100

Sumber data : DPMPTSP Kab. Pemalang

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 21 ASN terdapat 1 pegawai (4,76%) yang menduduki eselon II, 1 pegawai (4,76%) yang menduduki eselon III, 2 pegawai (9,52%) yang menduduki eselon IV, 2 pegawai (9,52%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional, serta 2 pegawai (9,52%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 3 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2024 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN (%)
1	Eselon II	1	4,76
2	Eselon III	1	4,76
3	Setara Eselon IV	2	9,52
4	Jabatan Fungsional Tertentu	2	9,52
5	Jabatan Fungsional Umum	2	9,52
6	Pengelola data dan informasi	9	42,85
7	Penelaah teknis kebijakan	3	14,28
8	Pengadministrasi perkantoran	1	4,76
Jumlah		21	100

Sumber data: DPMPTSP Kab. Pemalang

1.2.2 Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang :

Tabel I. 4 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Anggaran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
APBD	2023	Rp. 5.985.866.000	Rp.6.319.766.000
DAK Non Fisik	2023	Rp. 333.900.000	
APBD	2024	Rp. 5.826.038.400	Rp.6.406.130.400
DAK Non Fisik	2024	Rp. 580.092.000	

Sumber data: DPMPTSP Kab. Pemalang

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang

tahun 2021 – 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 nomor 6);

8. Peraturan Bupati Pemalang nomor 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
2. IKU Dinas PMPTSP Tahun 2021-2026
3. RENSTRA Tahun 2021-2026
4. Renja tahun 2024
5. Pohon Kinerja dan Cascading
6. LHE Inspektorat Atas AKIP Tahun 2024
7. Daftar Prestasi
8. Dokumentasi Inovasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang:

Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	1	2	3	10	12	13
		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	83,6	83,8	84	88,95	88,97	88,99
			Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	55,50	56	57	63,50	63,86	63,88

Sumber data: RPJMD 2021-2026 Kab. Pemalang

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	$\frac{\text{Realisasi Investasi Th } n - \text{Realisasi Investasi Th } (n-1)}{\text{Realisasi Investasi Th } (n-1)} \times 100$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
	Modal Dalam Negeri (PMDN)			
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Nilai komponen akuntabilitas kinerja dari Inspektorat

Sumber data: RPJMD Kab Pemalang dan Perbup IKU

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 :

Tabel II. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	10
		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	88,95
			Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	63,50

Sumber data: Renja DPMPTSP Kab. Pemalang tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

beserta target kinerja dan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	10
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	88,95
		Nilai SAKIP	Nilai	63,50

Sumber data: Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab. Pemalang

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.4.963.445.400
2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.9.970.000
3 Program Promosi Penanaman Modal	Rp.130.030.000
4 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.99.000.000
5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.690.092.000
6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.31.000.000
TOTAL	Rp. 5.923.537.400

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang:

Tabel II. 5 Program DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh - Nilai SAKIP	- 88,95 - 63,50
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ Bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Persentase Peningkatan jumlah investor	3,10%
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	100%
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi	100%
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Program Promosi penanaman Modal	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai investasi	Rp.205.038.302.261
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen
	Program pelayanan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	96%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perijinan yang disetujui	100%
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15.000 Pelaku Usaha
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yangmendapat pemantauan,analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	55 Kegiatan Usaha
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	46%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	12 kegiatan Usaha	

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	367 Pelau Usaha
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase realisasi perijinan	100%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Pada tanggal 9 bulan september tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel II. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	10
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	88,95
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	63,50

Sumber data: Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab Pemalang

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.5.185.966.400
2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.9.970.000
3 Program Promosi Penanaman Modal	Rp.280.030.000
4 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.109.072.000
5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RP.790.092.000
6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.31.000.000
TOTAL	Rp.6.406.130.400

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan. Pengukuran kinerja sasaran terhadap target kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	10%	11,67%	116,7	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	88,95	89,70	100,8	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	63,50	63,84	100,5	Sangat Tinggi	Inspektorat

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang dan LHE Sakip

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja untuk "Tujuan/Sasaran" capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase peningkatan PMA dan PMDN mencapai 11,67% dengan capaian 116,7%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Dilihat dari capaian nilai investasi, realisasi investasi Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar Rp.220.159.341.867 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.205.038.302.261 dengan capaian persentase sebesar 107,37%. Beberapa kegiatan telah dilakukan sehingga indikator kinerja ini dapat tercapai diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan pameran investasi di luar daerah, menyusun kajian potensi investasi di Kabupaten Pemalang dan kegiatan pendampingan perijinan kepada pelaku usaha.
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh mencapai 89,70 dengan capaian 100,8%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Langkah yang telah dilakukan sehingga capaian indikator ini tercapai adalah dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pembinaan kepada pegawai khususnya front office untuk selalu melayani pemohon dengan ramah dan senyum.
3. Indikator Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja mencapai 63,84 dengan capaian 100,5%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Langkah yang telah dilakukan untuk peningkatan nilai sakip adalah dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi dokumen sakip dari inspektorat, dan terus meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja.

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu 2023 serta beberapa tahun sebelumnya 2022, ditunjukkan dalam table sebagai berikut :

Tabel III. 3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	4,64	9,73	10	11,67	116,7
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	88,33	88,95	88,95	89,70	100,8
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	61,15	63,40	63,50	63,84	100,5

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa relisasi kinerja Tujuan/ Sasaran yang diukur dengan indikator Persentase peningkatan PMA dan PMDN mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 4,64% dari target sebesar 2%. Memasuki tahun 2023 realisasi kinerja meningkat dapat dilihat capaiannya sebesar 9,73% dari target sebesar 3%. Memasuki tahun 2024 capaian kinerja meningkat menjadi 11,67%, hal ini mencerminkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Pemalang terus meningkatkan kinerja setiap tahunnya.

Untuk indikator selanjutnya yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh mengalami kenaikan dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Capaian yang terus meningkat ini di tunjang dengan berbagai kegiatan diantaranya dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pembinaan kepada pegawai khususnya front office untuk selalu melayani pemohon dengan sepenuh hati.

Kemudian untuk indikatro yang terahir yaitu indikator Nilai SAKIP juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada 2022, 2023 dan 2024. Walaupun peningkatannya belum signifikan tetapi dapat dilihat bahwa sistem akuntabilitas

dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang ada pada DPMPTSP mengalai perbaikan dari tahun ketahun.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	11,67%	12%	97,25%
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	89,70	90	99,66%
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	63,84	64	99,75%

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga indikator kinerja tersebut tingkat kemajuan dibandingkan dengan target ahir RPJMD capaiannya di atas 95% semua, maka dari itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yakin bahwa target ahir periode RPJMD tahun 2021-2026 dapat dicapai.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan yang dihadapi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Keg agalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	10%	11,67%	116,7	Faktor penting pendukung keberhasilan indikator ini diantaranya dengan melakukan kegiatan pameran investasi di luar daerah, menyusun kajian potensi investasi di Kabupaten Pemalang dan kegiatan pendampingan perijinan kepada pelaku usaha.	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator persentase peningkatan PMA dan PMDN adalah dengan meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha dan melakukan pameran investasi yang lebih baik
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	88,95	89,70	100,8	Faktor penting pendukung keberhasilan indikator ini diantaranya dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pembinaan kepada pegawai khususnya front office	Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja indikator ini maka DPMPTSP Kab Pemalang senantiasa melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan melakukan inovasi terkait pelayanan
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	63,50	63,84	100,5	Faktor penting pendukung keberhasilan indikator ini diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja dengan baik.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	10%	11,67%	116,7	1.080.092.000	1.077.674.400	99,78	0,22
2	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	88,95	89,70	100,8	5.326.038.400	4.968.699.347	93,29	6,71
3	Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	63,50	63,84	100,5	5.326.038.400	4.968.699.347	93,29	6,71

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah mencapai efisiensi, karena kinerja sasaran strategis mencapai 100% dan adanya sisa anggaran. Sisa anggaran ada pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp.335.565.890 atau sebesar 9,75%. Ditambah lagi dengan adanya silpa pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terjadi penghematan energy listrik sebesar Rp.14.323.728 atau sebesar 9,37%.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel III. 7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	116,7	Program Promosi Penanaman Modal	100	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	100,8	Program Pelayanan Penanaman Modal	100	Menunjang
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	100,5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan tabel diatas, pada program promosi penanaman modal memiliki capaian kinerja 100%, pencapaian tersebut menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran persentase peningkatan PMA dan PMDN. Pada program ini berisi kegiatan pameran investasi penanaman modal yang bertujuan untuk mengenalkan peluang investasi yang ada dikabupaten pemalang. Selain pameran juga terdapat kegiatan penyusunan buku profil investasi yang dapat memberikan informasi terkait investasi di Kabupaten Pemalang.

3.2. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal satu Pintu Kabupaten Pemalang Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP).

Tabel III. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.185.966.400	4.831.187.147	93,16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.288.900	85.992.285	99,66
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.307.000	3.302.000	99,85
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.023.250	5.023.250	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.974.000	5.974.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.190.000	3.190.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.491.250	5.491.250	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.638.000	4.637.500	99,99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.665.400	58.374.285	99,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.449.260.500	3.113.694.610	90,27
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.608.000	3.106.042.110	90,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.663.000	3.663.000	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.989.500	3.989.500	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.071.000	398.863.064	99,95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.010.000	3.005.000	99,83

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.607.500	130.533.200	99,94
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.500	30.000.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.800.000	3.800.000	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.653.000	229.524.864	99,94
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.000.000	1.900.000	95,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	1.900.000	95,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	657.522.000	640.854.615	97,47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.900.000	95,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.714.000	138.390.272	90,62
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.808.000	500.564.343	99,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	591.824.000	589.882.573	99,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.940.000	99.567.800	99,63
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.850.000	71.357.884	99,32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.034.000	418.956.889	99,74
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	9.970.000	9.306.000	93,34

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.995.000	4.523.000	90,55
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.995.000	4.523.000	90,55
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4.975.000	4.783.000	96,14
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4.975.000	4.783.000	96,14
Program Promosi penanaman Modal	280.030.000	279.408.200	99,78
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	280.030.000	279.408.200	99,78
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	159.800.000	99,88
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	120.030.000	119.608.200	99,65
Program pelayanan Penanaman Modal	109.072.000	106.588.200	97,72
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	109.072.000	106.588.200	97,72
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	71.000.000	70.409.700	99,17

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	5.000.000	4.800.000	96,00
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	33.072.000	31.378.500	94,88
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	790.092.000	788.960.200	99,86
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	790.092.000	788.960.200	99,86
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	87.013.000	86.751.000	99,70
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	524.052.000	523.679.100	99,93
Pengawasan Penanaman Modal	179.027.000	178.530.100	99,72
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	31.000.000	30.924.000	99,75
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	30.924.000	99,75
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	31.000.000	30.924.000	99,75
TOTAL	6.406.130.400	6.046.373.747	94,38

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Dari tabel serapan anggaran tahun 2024 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Dapat dilihat dari 6 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan serapan anggaran semuanya diatas 85%. Serapan

anggaran sangat baik hingga mencapai 100% ada pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dari 7 sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan tersebut 4 (empat) diantaranya memiliki serapan anggaran sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pendukung perencanaan sangat baik berbanding lurus dengan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pematang Jaya.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dikategorikan Sangat Baik, yang terinci dari 2 sasaran strategis yaitu **"Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN"**, serta **"Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan"**, rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai 106% atau bermakna Sangat Baik. Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Capaian Kinerja 2024

			Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	Capaian Kinerja 2024
1.			Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Lokal	
1.1			Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	
	1.1.1		Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN	
		1.1.1.1	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	116,7%
	1.1.2		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	
		1.1.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	100,8%
		1.1.2.2	Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	100,5%
Prosentase Rata-rata capaian Tahun 2024				106%

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan hasilnya, 3 (tiga) indikator kinerja mencapai nilai capaian di atas 100% yang artinya dapat

mencapai bahkan melampaui target sasaran yang telah ditetapkan (kategori capaian **Sangat Baik**).

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada tahun selanjutnya. Berikut adalah tindak lanjut yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang :

Tabel IV. 2 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Agar melengkapi kerangka acuan kerja pada setiap kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan anggaran DPA dan RKA	Sudah menyusun Kerangka Acuan Kerja Tahun 2024
2	Memberikan informasi perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja, strategi, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dan pohon kinerja	Sudah menyusun dokumen Crosscutting dan Pohon kinerja
3	Meningkatkan OPD dalam menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indicator yang sama dan di ukur baik tingkat regional Provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada kondisi mana	Belum dapat menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan capaian nasional dikarenakan data tersebut belum ada.
4	Meningktakan kualitas laporan kinerja OPD sehingga dapat memberikan analisis sfisiensi atas hasil pencapaian tujuan dan sasaran dalam penggunaan sumberdaya atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan dan menggunakan data dari laporan kinerja untuk perbaikan strategi periode berikutnya	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen LKjIP tahun 2024
	Untuk mempublikasikan perencanaan kinerja tepat waktu yang telah di tentukan paling lambat 31 maret 2023 jam 23.59 di atur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014	Upload dokumen laporan kinerja akan dilakukan tepat waktu sesuai arahan Permenpan RB no 53 Tahun 2014

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
2. IKU Dinas PMPTSP Tahun 2021-2026
3. RENSTRA Tahun 2021-2026
4. Renja tahun 2024
5. Pohon Kinerja dan Cascading
6. LHE Inspektorat Atas AKIP Tahun 2024
7. Daftar Prestasi
8. Dokumentasi Inovasi



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHAERON, S.H, M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 23 September 2024

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG

MANSUR HIDAYAT

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG

KHAERON, S.H, M.M

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1.	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	10	-	-	-	10
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	88,95	-	88,95	-	88,95
		Nilai SAKIP	Nilai	63,50	-	-	63,50	-

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.185.966.400	DAU
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	9.970.000	DAU
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	280.030.000	DAU
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	109.072.000	DAU
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	790.092.000	DAU-DAK Non Fisik
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	31.000.000	DAU
JUMLAH		6.406.130.400	

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT

Pemalang, 23 September 2024

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H., M.M

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	perijinan yang disetujui	Persentase perijinan yang disetujui	%	100
2	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	%	100
3	Terlaksananya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	%	100
4	Terlaksananya kegiatan kajian peta otensi Investasi	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta otensi Investasi	%	100
5	Nilai investasi	Jumlah nilai investasi	Rupiah	205.038.302.261
6	Terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	109.072.000	50.511.500	32.964.500	13.750.000	11.846.000
2	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	12.379.000	6.907.000	7.407.000	4.307.000
3	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.995.000	0	0	4.995.000	0
4	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4.975.000	4.475.000	500.000	0	0
5	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	280.030.000	62.190.000	67.840.000	0	150.000.000
6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	790.092.000	267.561.000	198.375.000	197.098.000	127.058.000
Total Anggaran		1.220.164.000	397.116.500	306.586.500	223.250.000	293.211.000

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT

Pemalang, 23 September 2024

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H, M.M

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	15000	3750	3750	3750	3750
2	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	5	1	2	1	1
3	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yangmendapat pemantauan, analisis, evaluasi, danpelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	55	13	13	13	16
4	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	0	0	0	0
5	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	0	0	1	0
6	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
7	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	1	0	1
8	Jumlah dokumen kajian strategis promosi penanaman modal yang tersusun	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	2	1	0	0	1
9	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	12	3	3	3	3

10	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	367	100	100	119	48
11	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	20	5	5	5	5

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	71.000.000	35.071.500	23.454.500	10.700.000	1.774.000
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	5.000.000	2.740.000	2.060.000	200.000	0
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	33.072.000	12.700.000	7.450.000	2.850.000	10.072.000
4	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	31.000.000	12.379.000	6.907.000	7.407.000	4.307.000
5	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.995.000	0	0	4.995.000	0
6	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4.975.000	4.475.000	500.000	0	0
7	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	1.029.000	58.971.000	0	100.000.000
8	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	120.030.000	61.161.000	8.869.000	0	50.000.000
9	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	87.013.000	21.670.000	23.003.000	41.890.000	450.000

10	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	524.052.000	191.472.000	126.372.000	106.208.000	100.000.000
11	Pengawasan Penanaman Modal	179.027.000	54.419.000	49.000.000	49.000.000	26.608.000
	Total Anggaran	1.220.164.000	397.116.500	306.586.500	223.250.000	293.211.000

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT

Pemalang, 23 September 2024

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024(Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUALIP, S.Pd., M.M.**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **KHAERON, S.H., M.M.**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

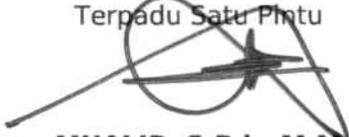
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu


KHAERON, S.H., M.M.

Pemalang, 23 September 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu


MUALIP, S.Pd., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024(Perubahan)
SEKRETARIAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya kegiatan Perencanaan,Penganggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase tersusunnya Perencanaan,Penganggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100
2	Terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	%	100
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
5	Terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100
6	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	%	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.288.900	20.711.500	11.560.400	32.025.750	21.991.250
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.449.260.500	756.890.804	1.254.995.640	754.145.284	683.228.772
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.071.000	110.541.250	100.102.000	80.999.750	107.428.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.000.000	0	0	0	2.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.522.000	169.945.000	167.727.000	167.727.000	152.123.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.824.000	52.430.000	241.274.000	82.250.000	215.870.000
Total Anggaran		5.185.966.400	1.110.518.554	1.775.659.040	1.117.147.784	1.182.641.022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


KHAERON, S.H., M.M.

Pemalang, 23 September 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


MUALIP, S.Pd., M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024(Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSDHALIFAH, S.H.**
Jabatan : **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUALIP, S.Pd., M.M.**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

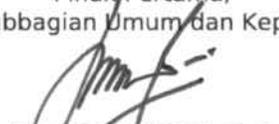
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



MUALIP, S.Pd., M.M.

Pemalang, 23 September 2024
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian



MUSDHALIFAH, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024(Perubahan)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12.00	3	3	3	3
2	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12.00	3	3	3	3
3	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12.00	3	3	3	3
4	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12.00	3	3	3	3
5	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12.00	3	3	3	3
6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	115.00	15	20	40	40
7	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1.00	0	0	0	1
8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	3	3	3	3
9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3
11	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	29.00	7	7	7	8

	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
12	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25.00	6	6	6	7
13	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1.00	0	0	0	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.010.000	2.000.000	1.010.000	0	0
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.607.500	39.641.250	34.692.000	31.285.750	24.988.500
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.500	7.500.000	5.000.000	3.107.000	14.393.500
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.800.000	1.500.000	1.500.000	800.000	0
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	0	0	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.653.000	57.900.000	57.900.000	45.807.000	68.046.000
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	0	0	0	2.000.000
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	0	0
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.714.000	40.118.000	39.900.000	39.900.000	32.796.000
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.808.000	127.827.000	127.827.000	127.827.000	119.327.000
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.940.000	30.500.000	27.390.000	26.500.000	15.550.000
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.850.000	8.430.000	5.350.000	52.750.000	5.320.000
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.034.000	13.500.000	208.534.000	3.000.000	195.000.000

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MUALIP, S.Pd., M.M.

Pemalang, 23 September 2024
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

MUSDHALIFAH, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024(Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARTO SANTOSO, S.E**
Jabatan : **Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUALIP, S.Pd., M.M.**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



MUALIP, S.Pd., M.M.

Pemalang, 23 September 2024
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan



HARTO SANTOSO, S.E

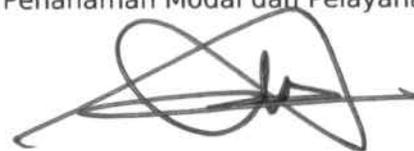
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024(Perubahan)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.00	0	1	1	0
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	0	1
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	0	1
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1.00	1	0	0	0
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4.00	2	1	1	0
8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	21.00	5	5	5	6
9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1.00	1	0	0	0

	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD						
10	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2.00	0	1	0	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.307.000	1.233.000	1.158.000	916.000	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.023.250	0	0	1.269.000	3.754.250
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.974.000	2.444.000	0	3.530.000	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.190.000	0	0	564.000	2.626.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.491.250	2.608.000	0	2.883.250	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.638.000	4.638.000	0	0	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.665.400	9.788.500	10.402.400	22.863.500	15.611.000
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.608.000	753.227.804	1.253.651.640	751.499.784	683.228.772
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.663.000	3.663.000	0	0	0
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.989.500	0	1.344.000	2.645.500	0

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



MUALIP, S.Pd., M.M.

Pemalang, 23 September 2024
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan



HARTO SANTOSO, S.E

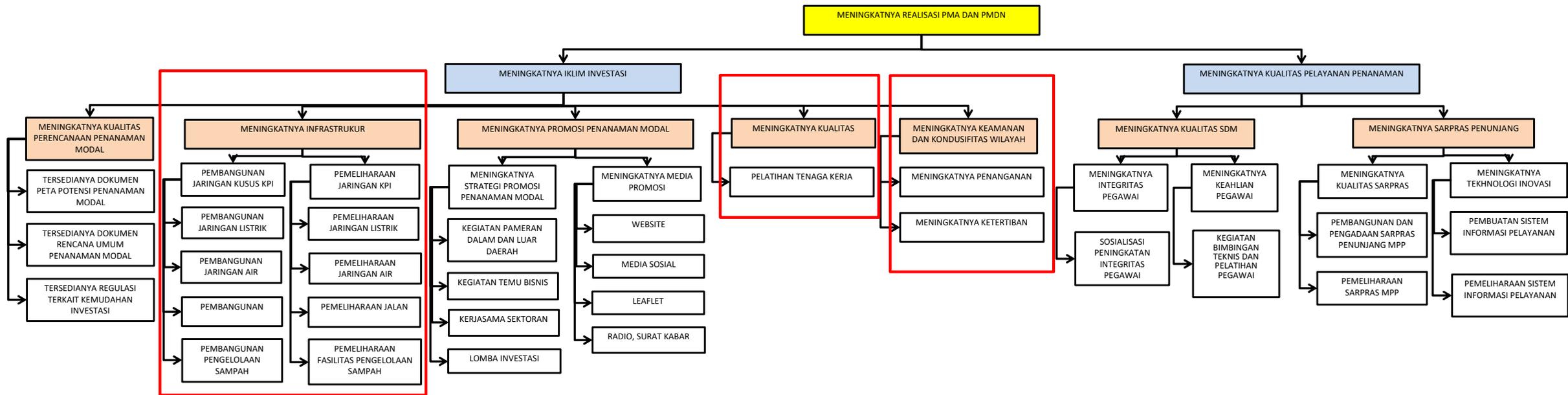
LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 – 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN 2021 – 2026**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi investasi tahun } (n - 1)} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Nilai komponen akuntabilitas kinerja dari Inspektorat



**CASCADING DINAS PMPTSP
TAHUN 2021-2026**

SASARAN DAERAH

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
Indikator : Pertumbuhan Nilai Realisasi Penanaman Modal

ESELON II

SASARAN PERANGKAT

Meningkatkan Realisasi PMA Dan PMDN
Indikator : Pertumbuhan Nilai Realisasi PMA Dan PMDN

ESELON II

TUJUAN PERANGKAT

Sasaran 1: Meningkatkan Realisasi PMA Dan PMDN
Indikator : Persentase Peningkatan PMA Dan PMDN. Target : 12 %

Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Layanan Urusan Pemerintahan.
Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh. Target : 89,80
Indikator 2: Nilai SAKIP. Target : 63,86

ESELON II

Program Pengembangan Iklim penanaman Modal
Indikator : Persentase Peningkatan jumlah investor

Program Promosi penanaman Modal
Indikator : Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator : Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu

Program pelayanan Penanaman Modal
Indikator: Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator : Persentase realisasi perijinan

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota
Indikator: Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta Potensi Investasi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Nilai Investasi

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Perijinan yang disetujui

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Tersusunya Data/ Informasi Pelayanan Perijinan

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Indikator : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Indikator : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab /Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator : Jumlah Dokumen HasilKegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
Indikator: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko

Pengawasan Penanaman Modal
Indikator: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan

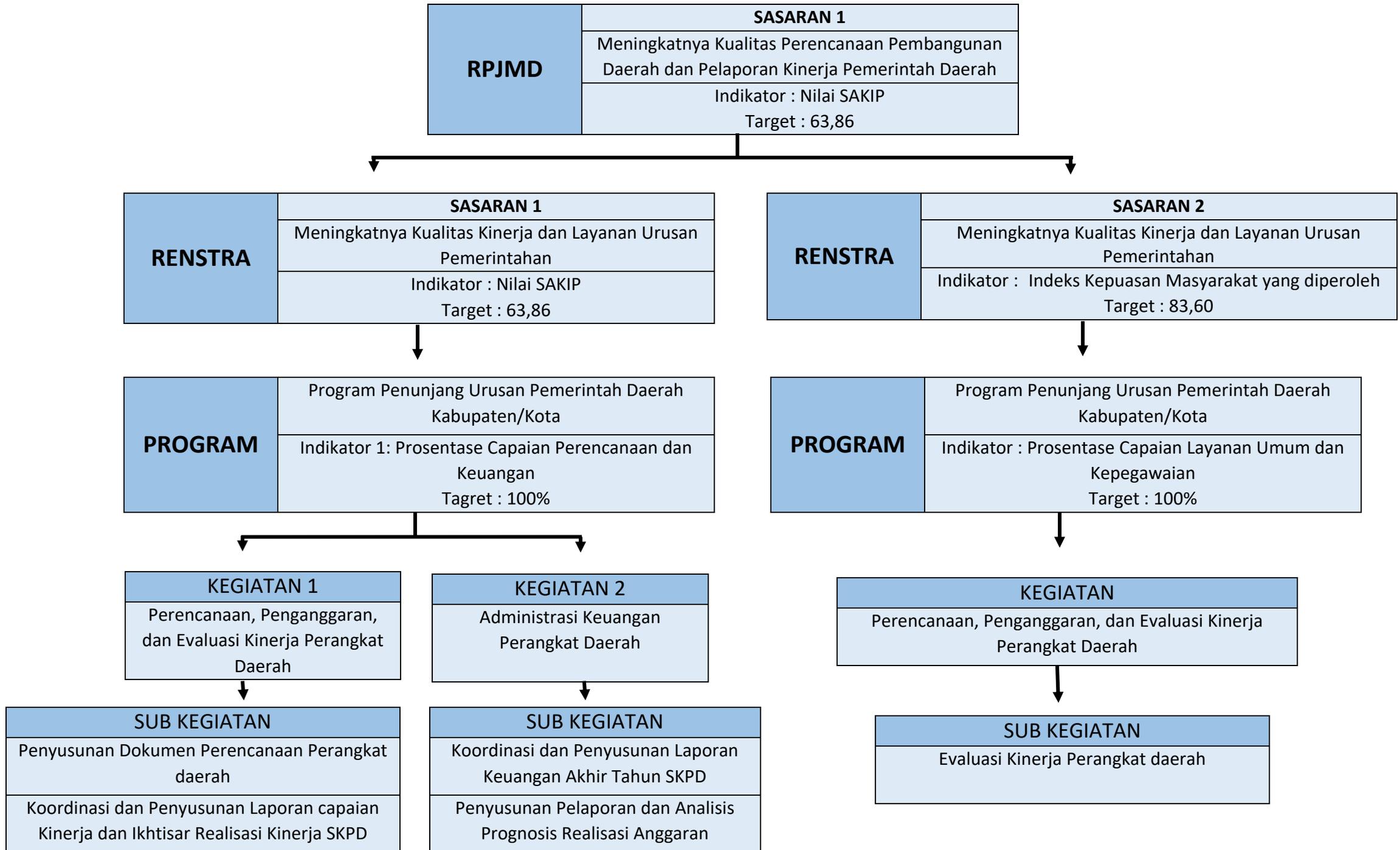
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan PelayananPerizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Indikator: Jumlah Pelaku usaha yang konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Indikator: Jumlah Kegiatan Usaha yangmendapat pemantauan, analisis, evaluasi, danpelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

CASCADING SEKRETARIAT





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

Nomor : 700/183/EVS/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

Pemalang, 27 Mei 2024
Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pemalang
di -
PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/12/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

g) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/33/SPT.Ev./2024 tanggal 16 April 2024.

1.2 Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi dibawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

1.3 Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4 Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :

- a) Penilaian perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5 Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

1.6 Susunan Tim

No	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab	:	CHAERUN, S.IP., M.M
2.	Supervisor	:	NURSETIAWATI, S.Kep., Ners., M.H.Kes
3.	Ketua Tim	:	TEGUH SUSANTO, S.IP
4.	Anggota	:	AGUS HASANI, S.IP., M.M.

1.7 Gambaran Umum Evaluatan.

- a. Dasar Hukum Pembentukan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dibentuk melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
 2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- b. Kedudukan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Tugas dan Fungsi
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.8 Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu misi ke - 5 "**Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal**", Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah menetapkan sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah 214,7%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN	Prosentase Peningkatan PMA dan PMDN	3%	9,73	324,3%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	88.95	105,1%
Nilai Rata- Rata					214,7%

Berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 214,7%, termasuk dalam kategori Sangat Baik. Pencapaian tertinggi ada pada Prosentase Peningkatan PMA dan PMDN yaitu mencapai 324,3% sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada tahun 2023.

1.9 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang diantaranya memuat : a. Tata Cara Pengumpulan Data Kinerja; b. Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja.	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja
2	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dan	a. Capaian kinerja per

	<p>kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.</p> <p>a. Capaian Kinerja per Bidang, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pejabat eselon III, dengan hasil kerjanya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data capaian Kinerja per bidang, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja individu sesuai bidang tugasnya; • Data/perhitungan efisiensi yang dapat dilakukan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja perbidang; <p>b. Capaian Kinerja PD, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Pejabat Eselon II atau pimpinan PD, dengan hasil kerjanya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PD per triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya; • Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja PD per triwulan berikutnya, yang disusun berdasarkan masalah/hambatan dalam upaya capaian kinerja PD. 	<p>bidang telah disusun setiap bulan dalam bentuk laporan realisasi fisik yang di evaluasi dan di unggah di aplikasi E-Monev, laporan evaluasi RKPD (triwulan), dan Laporan Capaian Kinerja (Triwulan).</p> <p>b. Capaian kinerja PD telah disusun setiap bulan dalam bentuk laporan realisasi fisik yang di evaluasi dan di unggah di aplikasi E-Monev, laporan evaluasi RKPD (triwulan), dan Laporan Capaian Kinerja (Triwulan).</p>
3	<p>Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara berkala dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang menghasilkan :</p> <p>a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2023;</p> <p>b. Rencana Aksi PD atas Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2023 yang dirangkum dari Rencana Aksi Perbidang;</p> <p>c. Memformalkan Dokumen hasil</p>	<p>a. Laporan monitoring evaluasi triwulan I dan II taun 2023 sudah dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi bulanan</p> <p>b. Evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan setiap bulan. Capaian kinerja per bidang maupun PD di rangkum dan di evaluasi untuk</p>

	monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja internal dan Rencana Aksi PD.	merencanakan rencana aksi pada bulan berikutnya. Dokumen hasil monitoring telah di formalkan dalam bentuk undangan rapat, daftar hadir, notulen dan dokumentasi kegiatan.
4	Melakukan revisi atas Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2022 yaitu agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;	Akan ditindaklanjuti pada saat penyusunan LKjIP pada tahun 2024

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai **63,84** kategori **Baik** dengan Predikat "B". Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan	30	4,60	5,97	10,50	21,07
Pengukuran Kinerja	30	4,00	6,30	8,70	19,00
Pelaporan Kinerja	15	1,90	3,15	4,82	9,87
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,00	3,90	7,00	13,90
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	13,50	19,32	31,02	63,84

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya (2022) mengalami peningkatan sebesar 0,44 yaitu dari 63,40

menjadi 63,84 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.1 Hasil Evaluasi

2.1.1 Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja
 - a. Telah ada Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, yaitu Surat Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang tanggal 6 April 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
 - b. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, yaitu RPJPD tahun 2005 - 2025 Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 24 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025.
 - c. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Renstra tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 -2026 dan Perbup Nomor 83 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
 - d. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek, yaitu Renja PD 2023.
 - e. Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, yaitu sudah ada rencana aksi sudah dibuat yang didalamnya sudah per triwulan dan belum seluruhnya dilengkapi Kerangka Acuan Kerja Level Kegiatan Tahun 2023 (TOR : *Term of Reference*).
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja, yaitu : DPA dan RKA tahun 2023, tetapi belum seluruhnya dilengkapi kerangka acuan kerja untuk setiap kegiatannya.
2. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja
 - a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, antara lain Renstra tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, Renja 2023 telah ditetapkan dengan Perbup nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023, RKA/DPA tahun 2023, rencana aksi dan PK tahun 2023 sudah ada dan telah ditetapkan dan di formalkan.

- b. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu paling lambat tgl 31 Maret 2024 jam 23.59.
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, serta kebijakan pada BAB V Renstra selaras dengan permasalahan dan isu strategis pada BAB III Renstra.
- d. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, rumusan tujuan/sasaran pada BAB IV renstra telah selaras dengan strategi dan arah kebijakan BAB V renstra.
- e. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, yaitu dapat diukur, dapat diidentifikasi, dapat dicapai, relevan, terkait langsung dan ada batasan waktu.
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*) tidak sering diganti dalam 1 periode strategi), dari tahun 2021 IKU masih tetap sama.
- g. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*Achievable*) menantang dan realistis, yaitu dapat dicapai, ada tantangan dan realistis.
- h. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) sudah sesuai.
- i. Perencanaan Kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan

(*crosscutting*) hal ini dikarenakan belum adanya *crosscutting* dan pohon kinerja.

- j. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, sudah ada PK eselon.
 - k. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dan setiap pegawai sudah membuat SKP.
3. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja
- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, DPA dan RKA telah memuat indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, target kinerja dalam PK telah dijabarkan secara periodik. *Cascading* dan SKP serta rencana aksi perangkat daerah tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan sehingga mendukung kinerja.
 - c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah tercapai dengan baik, karena sudah realisasi/pelaksanaan rencana aksi per triwulan berupa dokumen hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal yang memuat capaian target kinerja.
 - d. Rencana aksi kinerja sudah berjalan dinamis ; karena monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja sudah dilakukan secara berkala.
 - e. Ada perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja data diisi lengkap atas rencana aksi per triwulan. Pada evaluasi sudah ada permasalahan dan solusi per triwulan.
 - f. Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik ; karena monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja yang sudah disertakan masalah dan solusi setiap kegiatan, sehingga hasil monitoring dan evaluasi

internal capaian kinerja dapat dianalisa apakah menunjukkan hasil yang lebih baik dari triwulan sebelumnya.

- g. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan karena bidang/bagian belum melaksanakan monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja yang menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja dan menyusun rencana aksi setiap triwulan pada tahun berjalan.
- h. Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan karena telah merencanakan, mengukur/menghitung dan menginput capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja secara berkala/setiap bulan.

2.1.2 Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

- a. Terdapat pedoman teknis pengumpulan data dan pengukuran rencana kinerja yang disahkan oleh pimpinan yaitu Keputusan Pimpinan Nomor : 050/638/2023 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Rencana Kinerja.
- b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang disahkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.
- c. Terdapat mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP), tetapi belum ada Keputusan Kepala DPMPTSP pada tahun 2023.

2. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, hal ini dinilai dari dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja dan laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta rencana aksi yang ditandatangani oleh pimpinan.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan sudah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, yaitu sudah adanya data realisasi fisik dan keuangan bulanan dan data kinerja.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan yaitu data capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan.
- d. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala, sudah dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja terutama dokumen laporan hasil monitoring dan rencana aksi.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang melalui aplikasi <https://esr.menpan.go.id>.
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) pada <https://esr.menpan.go.id>.
- g. Pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Adapun bentuk inovasi yang dikembangkan selama ini yaitu berupa Aplikasi SIMDU yang terdiri dari 8 portal yaitu Pelayanan perizinan, SMS Center, E-Doc, Perizinan Online, GIS, Informasi, IKM, OSS (*Online Single Submission*).

3. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- b. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional karena belum ada peraturan, yang menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai variabel indikator dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- c. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) organisasi yaitu belum ada evaluasi SOTK atas dasar hasil pengukuran kinerja.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yaitu telah dilakukan reviu dan perubahan atas renstra.
- e. Pengukuran kinerja sudah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja yaitu sudah ada kebijakan tertulis yang diputuskan atas dasar hasil pengukuran kinerja.
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja yaitu telah ada rencana aksi sebagai penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja pada tahun berjalan;
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja yaitu adanya perubahan anggaran pada RKA tahun berjalan;
- h. Sudah ada efisiensi anggaran atas capaian kinerja yaitu telah ada rencana aksi sebagai penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja pada tahun berjalan tetapi belum menganalisis efisiensi atas hasil pencapaian tujuan dan sasaran dalam penggunaan sumberdaya atas perbaikan manajemen kinerja.
- i. Setiap unit/satuan memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja di buktikan dengan adanya hasil pengukuran kinerja berupa hasil monitoring capaian kinerja dan rencana aksi pada setiap unit/bidang di PD.
- j. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; karena Pegawai telah merencanakan, mengukur/menghitung dan memperbaiki target kinerja berikutnya,

serta menginput capaian kinerja melalui website <https://simpeg.pemalangkab.go.id/> secara berkala/setiap bulan.

2.1.3 Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen Laporan Kinerja yaitu LKjIP DPMPTSP Tahun 2023 telah disusun.
 - b. Dokumen Laporan Kinerja DPMPTSP telah disusun secara berkala pertahun.
 - c. Dokumen Laporan Kinerja DPMPTSP telah diformalkan yaitu ditandatangani pimpinan.
 - d. Dokumen Laporan Kinerja DPMPTSP telah direviu oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang.
 - e. Dokumen Laporan Kinerja DPMPTSP telah dipublikasikan yaitu melalui Website <https://dinaspmptsp.pemalangkab.go.id>.
 - f. Dokumen Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 telah disampaikan tepat waktu, yaitu pada bulan Februari 2024.
2. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar yaitu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yaitu LKjIP pada BAB III telah memuat target, realisasi dan capaian kinerja.
 - c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yaitu LKjIP pada BAB III telah memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.

- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu LKjIP BAB III memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam periode Renstra.
 - e. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP pada BAB III) sudah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - f. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*); yaitu dokumen LKjIP pada BAB III telah memuat perbandingan realisasi kinerja antar Kabupaten / Kota pada Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP BAB III) telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - h. Belum sepenuhnya dokumen laporan kinerja (LKjIP BAB III) menginfokan efisiensi kinerja atas analisis tujuan dan sasaran penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 - i. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP BAB IV) telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja/rencana Tindak lanjut).
3. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja
- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), dibuktikan telah ada pernyataan pertanggungjawaban pimpinan atas muatan materi dalam LKjIP pada lampiran dan dibuktikan telah ada dokumen rapat evaluasi kinerja bulanan.
 - b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja sudah menjadi kepedulian seluruh pegawai yaitu telah dilaksanakannya rapat tentang pembahasan LKjIP.
 - c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu LKjIP telah

- digunakan dalam penyesuaian aktivitas dalam Renja tahun berikutnya.
- d. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yaitu LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian penyusunan anggaran (DPA/RKA) tahun berikutnya.
 - e. Informasi dalam laporan kinerja sudah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yaitu telah disajikan tingkat capaian kinerja pada Bab III LKjIP.
 - f. Informasi dalam laporan kinerja sudah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, yaitu LKjIP digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja dalam Renja tahun berikutnya.
 - g. Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, yaitu LKjIP telah mempengaruhi budaya kinerja organisasi ke arah yang lebih baik.

2.1.4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Kondisi Keberadaan / Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Internal
 - a. Telah disusun Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Pemda Kabupaten Pemalang dalam bentuk draf sesuai standar, saat ini menggunakan Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2021.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan oleh APIP yaitu terbitnya LHE Nomor : 700/024/EVS/VI/2003 tanggal 16 Juni 2023;
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang, yaitu Penilaian AKIP pada tingkat PD dilaksanakan oleh APIP (nilai SAKIP DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun sebelumnya = 63,40), kemudian pada tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB (nilai SAKIP = 69,01)

2. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal
 - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, yaitu sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai; yaitu evaluasi dilakukan oleh evaluator yang telah mendapatkan pelatihan dan evaluasi telah mendapatkan bintek.
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif dan teknik evaluasi, checklist dokumen, tanya jawab dan observasi.
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
 - e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
3. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal
 - a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti;
 - b. Sudah ada peningkatan Implementasi SAKIP karena rekomendasi untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja yang menghasilkan rencana aksi sudah ditindaklanjuti;
 - c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - d. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;

- e. Belum sepenuhnya terlihat perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

1. Agar melengkapi kerangka acuan kerja pada setiap kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan anggaran DPA dan RKA.
2. Memberikan informasi perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dan pohon kinerja.
3. Meningkatkan PD dalam menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada kondisi mana.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada PD sehingga dapat memberikan analisis efisiensi atas hasil pencapaian tujuan dan sasaran dalam penggunaan sumberdaya atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan dan menggunakan data dari laporan kinerja untuk perbaikan strategi periode berikutnya.
5. Untuk mempublikasikan perencanaan kinerja tepat waktu yang telah di tentukan paling lambat tgl 31 maret 2024 jam 23.59 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

III. Penutup

3.1 Simpulan

3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memperoleh nilai **63,84** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,07
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,87
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,90
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,84

3.1.2 Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 63,84 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori penilaian "**BAIK**" (**B**) dengan interpretasi Baik (bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja).

3.2 Dorongan untuk implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP pada instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai dengan optimal yang pada akhirnya dapat memperbaiki manajemen

kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 27 Mei 2024

INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



EDY SUSILO TEMU RAHARJO, ST.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200501 1 005

kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 27 Mei 2024
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



EDY SUSILO TEMU RAHARJO, ST.

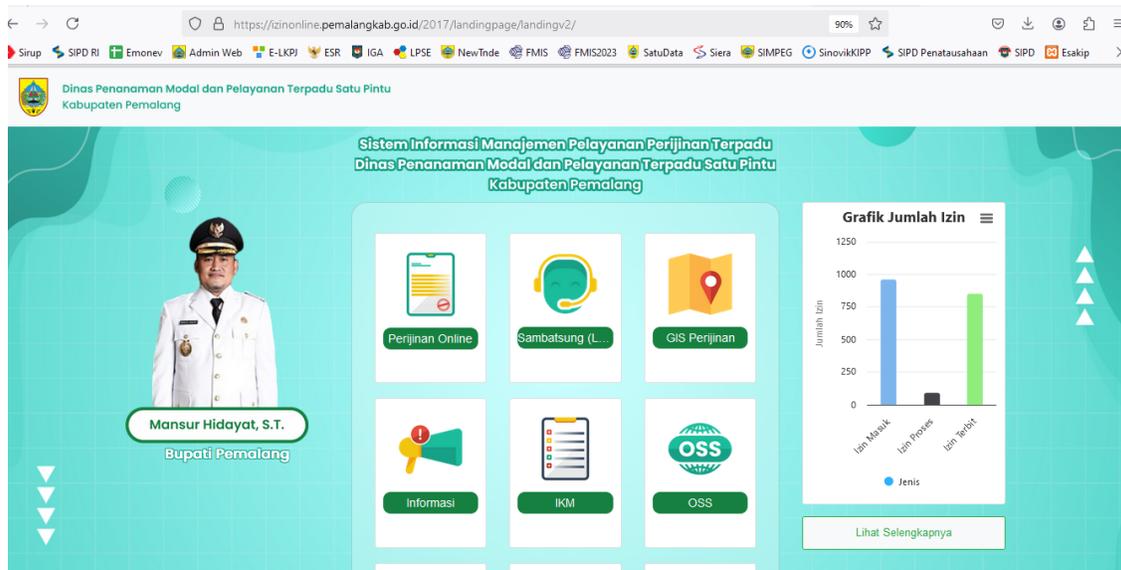
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200501 1 005

DAFTAR PRESTASI TAHUN 2024

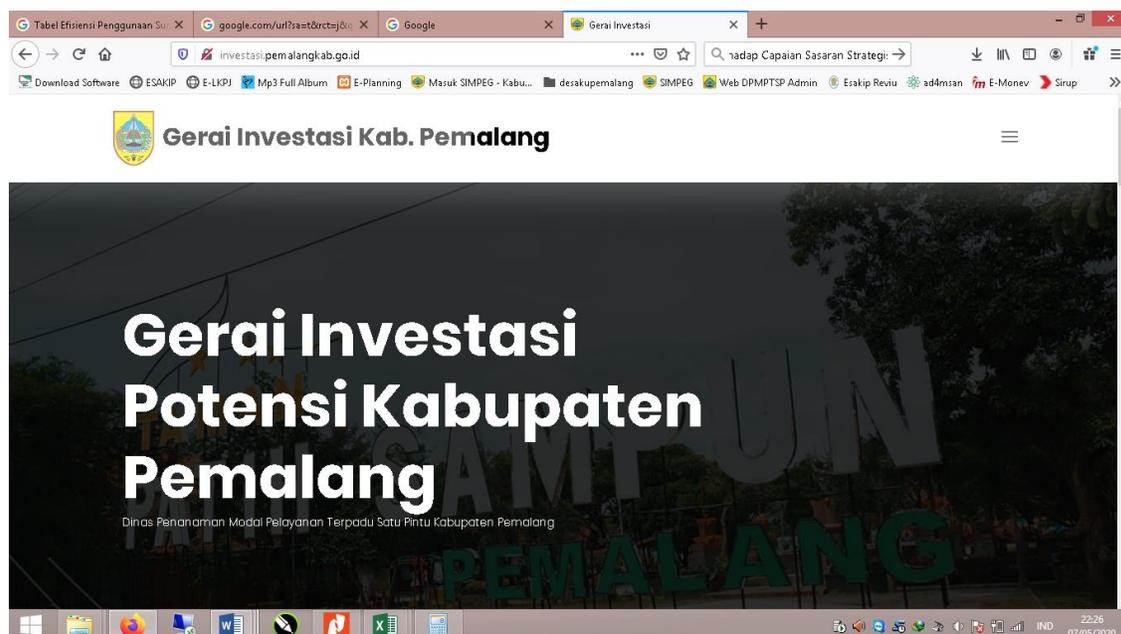


DOKUMENTASI INOVASI

1. Aplikasi SIMDU (Sistem Informasi Manajemen Perijinan Terpadu)
“izinonline.pemalangkab.go.id”



2. Gerai Ivestasi (investasi.pemalangkab.go.id)



3. Aplikasi Aduan Berbasis Elektronik "SAMBATSUNG" (*izinonline.pemalangkab.go.id*)

